

	Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal
--	--

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan II 2026	Realisasi Triwulan II 2026	Capaian (%)
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang Berkualitas					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk <i>Investor Relation Unit</i> (IRU) dan <i>Recent Economic Development</i> (RED)	Persentase	100%	50%	55%	110%
1.2	Indikator 1.2 Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal	Persentase	100%	50%	55%	110%
II	Sasaran Program 2. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal					
2.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	100%
III.	Sasaran Program 3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal yang Profesional					
3.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal	Persentase	92%	40%	40%	100%

Kinerja Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang Berkualitas
----------	---

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif internal *business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder yang ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk *Investor Relation Unit* (IRU) dan *Recent Economic Development* (RED); dan
2. Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1.1. Persentase

Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk Investor Relation Unit (IRU) dan Recent Economic Development (RED)

Latar Belakang

Terwujudnya kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif internal *business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif *stakeholder*. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mencakup: a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh deputi.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, serta Transparansi dan Partisipasi Publik. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan dan rumusan kebijakan yang terkait melalui dokumen yang relevan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis

proses dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir;
- Notula/ Risalah/ Berita acara;
- Kajian dalam bentuk *policy paper*, *policy brief*, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan)

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- IRU Triwulan I (Januari-Maret) yang difokuskan pada pembahasan mengenai *Macroeconomic Sector*;
- RED Triwulan I (Januari-Maret) yang difokuskan pada perkembangan ekonomi global dan perdagangan Internasional;
- Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan FGD terkait Strategi Perdagangan Indonesia di Tengah Kebijakan Perdagangan Global.
- Beberapa isu ataupun substansi terkait perkembangan ekonomi global dan domestik, prospek dan tantangan perekonomian, strategi kebijakan, dan/atau substansi lainnya.
- Penyusunan laporan pasar harian mencakup rangkuman data dan informasi harian terkait kondisi pasar keuangan, berita terkini, kalender ekonomi, dan rilis data Indonesia dan global.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam

program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- IRU Triwulan II (April-Juni) yang difokuskan pada pembahasan mengenai *Real Sector & Investment Environment*;
- RED Triwulan II (April-Juni) yang difokuskan pada Ketahanan Sektor Eksternal di awal tahun 2026;
- Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan FGD terkait Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi Global
- Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait perkembangan ekonomi global dan domestik, prospek dan tantangan perekonomian, strategi kebijakan, dan/atau substansi lainnya.
- Penyusunan laporan pasar harian mencakup rangkuman data dan informasi harian terkait kondisi pasar keuangan, berita terkini, kalender ekonomi, dan rilis data Indonesia dan global.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;

- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- IRU Triwulan III (Juli-September) yang difokuskan pada pembahasan mengenai *Financial & External Sector*; dan
- RED Triwulan III (Juli-September) yang difokuskan pada investasi.
- Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait perkembangan ekonomi global dan domestik, prospek dan tantangan perekonomian, strategi kebijakan, dan/atau substansi lainnya.
- Penyusunan laporan pasar harian mencakup rangkuman data dan informasi harian terkait kondisi pasar keuangan, berita terkini, kalender ekonomi, dan rilis data Indonesia dan global

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- IRU Triwulan IV (Oktober – Desember) yang difokuskan pada pembahasan mengenai *Economic Structural Reform & Transformation*;
- Recent Economic Development (RED) Triwulan IV yang difokuskan pada Strategi kebijakan Pemerintah; dan
- Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait perkembangan ekonomi global dan domestik, prospek dan tantangan perekonomian, strategi kebijakan, dan/atau substansi lainnya.
- Penyusunan laporan pasar harian mencakup rangkuman data dan informasi harian terkait kondisi pasar keuangan, berita terkini, kalender ekonomi, dan rilis data Indonesia dan global.

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan untuk *Investor Relation Unit (IRU)* dan *Recent Economic Development (RED)*

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk *Investor Relation Unit (IRU)* dan *Recent Economic Development (RED)*

Perhitungan persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan untuk IRU dan RED dilakukan setiap triwulan. Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada perkiraan dan target kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2026. Adapun target triwulan II tahun 2026 sebesar 50%.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk IRU dan RED yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 110% atau mencapai 55% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk <i>Investor Relation Unit (IRU)</i> dan <i>Recent Economic Development (RED)</i>	Persentase	100%	55%	110%

Investor Relation Unit (IRU)

Penyusunan *Presentation Book* (PB) IRU berfokus untuk menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan para investor, analis, dan pemangku kepentingan lainnya. PB IRU berperan strategis dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan pemerintah dipahami dengan benar oleh pemangku kepentingan dan sesuai dengan harapan dan kebutuhan investor. PB IRU pada triwulan I tahun 2026 mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan yang banyak dikeluarkan pada masa awal pemerintahan, seperti: Asta Cita (8 Program Prioritas 2025 – 2029), Visi Indonesia Emas 2025 – 2045, dan Paket Stimulus Ekonomi tahun 2026. Realisasi kinerja Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal pada triwulan II tahun 2026, utamanya dalam hal penyusunan PB IRU terselenggara melalui:

1. Koordinasi Materi PB IRU

- Mempertimbangkan berbagai pembaruan maupun pergeseran kebijakan, Asdep Ekonomi Makro dan Fiskal kembali menyampaikan Nota Dinas Nomor: EKM.06/63/D.II.M.EKON.6/05/2026, tanggal 18 Mei 2026, perihal “Permohonan Update Kebijakan”.
- Memperhatikan hal tersebut di atas, koordinasi yang dilaksanakan sejak Mei 2026 tidak lagi berdasarkan Nota Dinas Nomor: EK.02/23/D.II.M.EKON.6/01/2025, tanggal 24 Januari 2025, perihal “Permohonan Update Kebijakan”.
- Meskipun demikian, Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal tetap berkoordinasi dengan K/L terkait dalam menghimpun data dan informasi tambahan yang akan disajikan.
- Selanjutnya, koordinasi dilakukan secara informal antara Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal dengan unit- unit terkait.

2. Penyusunan PB IRU

- PB IRU selalu terdiri dari 2 bagian utama, yaitu analisa makroekonomi dan kebijakan reformasi struktural.
- Pada bagian analisa makroekonomi, dilakukan perhitungan dan analisa untuk data terbaru PDB dan inflasi secara global. Sedangkan pada data makroekonomi Indonesia, dilakukan perhitungan dan analisa untuk data terbaru investasi, indeks keyakinan konsumen, cadangan devisa, dan perdagangan.
- Pada bagian kebijakan reformasi struktural, menyampaikan isu-isu yang dianggap menjadi perhatian investor, seperti paket kebijakan ekonomi, kebijakan dalam pengendalian inflasi, kebijakan fiskal, kebijakan ekspor & impor, kebijakan investasi, kebijakan ekonomi digital, kebijakan tenaga kerja, kebijakan hubungan luar negeri, PSN, kebijakan hilirisasi, dan kebijakan ekonomi hijau.
- Dalam perkembangannya, dengan dasar koordinasi yang telah dilakukan, Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal menganalisa isu-isu yang relevan untuk dipertahankan atau ditambahkan pada PB IRU dan mengurangi isu yang sudah tidak menjadi perhatian.

- Berdasarkan pada hal tersebut di atas, Pada masa triwulan II ini, dinilai penting untuk menambahkan isu mengenai kepariwisataan *dan economic vehicle*, serta mempertajam isu investasi dan hilirisasi, kerjasama ekonomi, dan transisi energi.

Recent Economic Development (RED)

Penyusunan RED/Perkembangan Ekonomi Terkini merupakan publikasi rutin yang dilakukan secara bulanan untuk menyajikan rangkuman data, informasi, dan analisis mengenai perkembangan perekonomian Indonesia dan global serta mengkomunikasikan strategi dan kebijakan Pemerintah Indonesia terkini. Selama triwulan II telah dilakukan penyusunan RED sebanyak 2 edisi (bulan April dan Juni). RED tersebut juga telah disampaikan kepada Bapak Menko Perekonomian dan disebarkan kepada unit eselon II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai referensi dan informasi perkembangan ekonomi terkini. Selain itu, RED ini juga telah di publikasikan dalam website Kemenko Bidang Perekonomian dan bisa diakses oleh masyarakat luas.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan untuk <i>Investor Relation Unit</i> (IRU) dan <i>Recent Economic Development</i> (RED)			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi <i>Investor Relations Unit</i> (IRU) dan Penyusunan Laporan bulanan <i>presentation book</i> IRU (edisi April, Mei, Juni) yang difokuskan pada pembahasan mengenai <i>Real Sector & Investment Environment</i>	Terlaksana	<i>Presentation Book</i> IRU edisi April-Juni 2026 telah disusun, dipublikasikan melalui website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan media lainnya, serta didistribusikan kepada para pemangku kepentingan terkait
2.	Koordinasi dan Penyusunan laporan RED Triwulan II yang difokuskan pada ketahanan sektor eksternal	Terlaksana	RED Triwulan II 2026 (edisi April dan Juni) telah disusun dan dipublikasikan melalui website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta didistribusikan kepada para pemangku kepentingan terkait.
3.	Pelaksanaan FGD terkait Dinamika	Terlaksana	FGD bertema "Geopolitik Memanas, Ekonomi Global Tertekan: Ke Mana Arah

	Geopolitik dan Geoekonomi Global		Indonesia?" dilaksanakan pada 22 April 2026 dengan narasumber dari INDEF dan ADB Indonesia <i>Resident Mission</i> .
--	----------------------------------	--	--

Upaya Nyata

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan DTM IRU Nasional dalam rangka persiapan *Annual Review* SCR Indonesia oleh S&P tahun 2026.
2. Pengiriman pegawai pada *Macroeconomics Forecasting and Analysis Course* di Dalian, RRT (1-12 Juni 2026).

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya rapat dilaksanakan menggunakan *zoom meeting* dengan mengundang narasumber yang ahli dibidangnya sehingga menambah ilmu dan wawasan bagi para pegawai di lingkup Asdep Ekonomi Makro dan Fiskal. Selain itu, penyimpanan dan dokumen serta keperluan administrasi persuratan menggunakan e-dokumen, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp18.200.000,-

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan adalah tidak dapat dialokasikannya perpanjangan Bloomberg dan CEIC di unit Keasdepan Ekonomi Makro dan Fiskal sehingga ketika penyusunan RED dan IRU membutuhkan waktu yang lebih lama. Langganan Bloomberg dan CEIC hanya boleh dilakukan oleh Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama.

Rumusan rekomendasi/upaya perbaikan demi tercapainya target kinerja

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melaksanakan program/kegiatan sesuai rencana aksi pada triwulan III 2026 sehingga dapat mempublikasikan *Presentation Book* IRU dan RED di website Kemenko Bidang Perekonomian sesuai dengan jadwal yang ditentukan (*on time*).
2. Akses Bloomberg dan CEIC agar lebih mudah diakses secara bergantian dengan unit kerja lain di lingkup Kemenko Bidang Perekonomian.

1.2.1. Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang

Latar Belakang

Terwujudnya kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif internal business process yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang

***Ekonomi Makro dan
Fiskal yang
Berkualitas***

Perekonomian yang mencakup: a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh deputi.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Perencanaan Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan, dan Transparansi dan Partisipasi Publik. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan perencanaan program dan rumusan kebijakan yang terkait (*data analisis, policy brief*, dan dokumen lain yang relevan).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan.

Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan

hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;

- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- Diagnosa Ekonomi Makro terkait perdagangan internasional dan investasi;
- Ketahanan Fiskal terkait belanja negara;
- Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait arah kebijakan fiskal Indonesia, realisasi dan proyeksi APBN, stabilitas utang dan kebutuhan pembiayaan, kerentanan fiskal dan faktor risiko, investasi, hubungan perdagangan dengan negara lain dan/atau substansi lainnya.

Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- Diagnosa Ekonomi Makro terkait perdagangan internasional;
- Ketahanan Fiskal terkait pembiayaan;
- Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait arah kebijakan fiskal Indonesia, realisasi dan proyeksi APBN, stabilitas utang dan kebutuhan pembiayaan, kerentanan fiskal dan faktor risiko, investasi, dan/atau substansi lainnya.

Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan

dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- Diagnosa Ekonomi Makro terkait perdagangan internasional;
- Ketahanan Fiskal terkait penerimaan negara;
- Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait arah kebijakan fiskal Indonesia, realisasi dan proyeksi APBN, stabilitas utang dan kebutuhan pembiayaan, kerentanan fiskal dan faktor risiko, perdagangan internasional dan/atau substansi lainnya.

Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah:

- Diagnosa Ekonomi Makro terkait investasi;
- Ketahanan Fiskal terkait belanja negara;
- Beberapa isu ataupun substansi yang akan dibahas antara lain terkait arah kebijakan fiskal Indonesia, realisasi dan proyeksi APBN, stabilitas utang dan kebutuhan pembiayaan, kerentanan fiskal dan faktor risiko, investasi, dan/atau substansi lainnya.

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \text{Nilai Tahapan Pertama} + \text{Nilai Tahapan Kedua} + \text{Nilai Tahapan ketiga} + \text{Nilai Tahapan keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada perkiraan dan target kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2026. Adapun target triwulan sebesar 25% untuk triwulan I, 50% untuk triwulan II, 75% untuk triwulan III, dan 100% untuk triwulan IV.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 110% atau mencapai 55% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU.1.2. Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian	Persentase	100%	55%	110%

Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal				
--	--	--	--	--

Diagnosa Ekonomi Makro

Diagnosa Ekonomi Makro pada tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan serta menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memberikan rekomendasi terkait dengan ketahanan makroekonomi serta memperkuat ketahanan fiskal nasional untuk mendukung program – program prioritas dan strategis nasional yang telah disusun. Diagnosa ekonomi makro pada triwulan II tahun 2026 masih difokuskan pada sektor investasi dan perdagangan internasional, sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian global serta isu fragmentasi, serta untuk mendukung tercapainya IKU Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi. Realisasi kinerja Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal pada triwulan II tahun 2026, utamanya dalam hal Diagnosa Ekonomi Makro terselenggara melalui:

1. Koordinasi Isu Ekonomi Makro khususnya Perdagangan Internasional

- Koordinasi pembahasan upaya mitigasi dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap pertumbuhan industri nasional, guna merumuskan langkah antisipatif bersama kementerian/lembaga terkait
- Penyiapan bahan referensi perdagangan dengan Australia, Belanda, Inggris, dan Swiss serta indikator ekonomi negaranya sebagai dukungan substansi bagi delegasi Indonesia dalam rangkaian *OECD Ministerial Council Meeting*
- Penyiapan bahan referensi bilateral data perdagangan dan investasi Indonesia–Uni Eropa, sebagai dukungan koordinasi kerja sama ekonomi bilateral.
- Penyampaian respons atas verifikasi penyelidikan *Countervailing Duty* (CVD) produk panel surya oleh USDOC, sebagai dukungan posisi Indonesia kepada Direktorat Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan.

2. Analisis dan Proyeksi Ekonomi Makro

- Penyusunan analisis persentase ekspor 1.819 produk yang dikecualikan dari tarif tambahan Amerika Serikat, sebagai kontribusi data strategis dalam mendukung keberhasilan diplomasi perdagangan Indonesia memperoleh pengecualian tarif atas produk ekspor dimaksud.
- Penyusunan analisis pelemahan nilai tukar Rupiah, mencakup identifikasi faktor penyebab, dampak terhadap perekonomian nasional, dan rekomendasi kebijakan respons kepada Bapak Menko
- Penyusunan analisis transfer pricing, tax treaty, dan penyelesaian sengketa pajak Indonesia–India, sebagai bahan masukan kebijakan untuk memperkuat iklim investasi bilateral

- d. Partisipasi dalam *Brownbag Seminar* bertema *Nighttime Light Index* dan *Nowcasting Indonesia's GDP Growth* di Dewan Ekonomi Nasional, sebagai upaya pendalaman kapasitas analitik dalam pemanfaatan data citra satelit sebagai proksi indikator aktivitas ekonomi, guna mendukung penyempurnaan metodologi nowcasting dan konstruksi *Leading Economic Indicator* (LEI).
- e. Pengumpulan data konsumsi listrik nasional secara berkala dari PT PLN (Persero) untuk periode April dan Mei 2026, sebagai komponen dalam konstruksi dan pemutakhiran *Leading Economic Indicator* (LEI) bulanan yang difungsikan sebagai proksi indikator aktivitas ekonomi terkini.

Ketahanan Fiskal

Ketahanan fiskal pada tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, ketahanan fiskal juga bertujuan untuk mendukung keberlanjutan program prioritas nasional. Upaya ini dilaksanakan melalui koordinasi pada triwulan II tahun 2026, dengan beberapa area yaitu:

1. **Optimalisasi Penerimaan Negara di Bidang Perpajakan**
 - a. **PPN DTP jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi**

Pada 8 April 2026 dilaksanakan rapat harmonisasi RPKM mengenai PPN atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dalam rangka dukungan pemerintah terhadap dinamika kenaikan harga avtur yang ditanggung pemerintah TA 2026. Hasil rapat telah disampaikan melalui Nota Dinas Nomor EKM.01.01/40/D.II.M.EKON.6/4/2026 tanggal 10 April 2026. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga keterjangkauan tarif angkutan udara dan daya beli masyarakat di tengah tekanan biaya avtur. Regulasi terkait telah terbit sebagai PMK Nomor 24 Tahun 2026. Regulasi terkait juga sudah terbit sebagai PMK Nomor 43 Tahun 2026 terkait PPN DTP jasa angkutan udara kelas ekonomi pada periode libur sekolah TA 2026.
 - b. **Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.**

Kebijakan ini dibuat atas dasar surat KPK mengenai perlunya perbaikan kebijakan pemberian pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dengan mempertimbangkan rekam jejak fraud Wajib Pajak. Harmonisasi telah dilakukan pada 6 April 2026. Regulasi terkait telah terbit sebagai PMK Nomor 28 Tahun 2026.
 - c. **Insentif fiskal, *tax holiday*, dan dukungan investasi.**

Penyusunan kebijakan bertujuan untuk memperpanjang pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*tax holiday*) sampai dengan 31 Desember 2026 dari yang semula hanya sampai dengan 31 Desember 2025. Laporan hasil rapat telah disampaikan melalui Nota Dinas Nomor EKM.01.02/43/D.II.M.EKON.6/04/2026 tanggal 7 April 2026. Selain itu, pada 13 April 2026 dilakukan pembahasan terkait perubahan Perban BKPM mengenai rincian bidang usaha dan jenis produksi industri pionir

serta pembahasan dukungan pemerintah untuk mobil nasional. Agenda ini berkaitan dengan upaya menjaga daya tarik investasi, memperkuat industri pionir, dan memberikan kepastian atas skema insentif fiskal.

d. PPN DTP atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat.

Pada 20 Mei 2026 dilaksanakan rapat pleno pengharmonisasian RPMK tentang PPN atas penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat tertentu yang ditanggung pemerintah TA 2026. Hasil rapat disampaikan melalui Nota Dinas Nomor EKM.01.06/70/D.II.M.EKON.6/05/2026 tanggal 23 Mei 2026.

e. PPN transaksi digital luar negeri

Pada 22 Mei dan 2 Juni 2026, dilakukan pembahasan RPMK tentang tata cara pemungutan PPN terhadap transaksi digital luar negeri yang dilakukan melalui sistem perdagangan elektronik. Kedua agenda tersebut mendukung perluasan basis pajak sekaligus menjaga konsistensi insentif fiskal untuk transisi energi.

f. PPh DTP atas bunga/imbalan SBN valas domestik

Pada 25 dan 29 Mei 2026 dilakukan pra-harmonisasi, public hearing, dan rapat pleno atas RPMK mengenai PPh Ditanggung Pemerintah atas bunga atau imbalan Surat Berharga Negara dalam valuta asing yang diterbitkan pemerintah di pasar domestik TA 2026. Laporan rapat telah disampaikan melalui Nota Dinas Nomor EKM.01.01/83/D.II.M.EKON.6/05/2026 tanggal 29 Mei 2026. Agenda ini berkaitan dengan upaya pendalaman pasar keuangan domestik, diversifikasi sumber pembiayaan, dan penguatan instrumen penempatan valas di dalam negeri.

g. Pajak rokok dan pembenahan administrasi perpajakan

Pada 19 Juni 2026 dilakukan rapat pleno pengharmonisasian RPMK tentang perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran yang bersumber dari bagi hasil pajak rokok. Sebelumnya, pada periode TW II juga telah disampaikan PMK Nomor 26 Tahun 2026 tentang tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok. Selain itu, pada 18 Juni 2026 dilakukan harmonisasi RPMK perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Agenda ini memperkuat kepastian tata kelola pajak pusat-daerah dan penyelesaian administrasi perpajakan.

h. Kebijakan kepabeanan dan cukai untuk perlindungan industri dan kelancaran perdagangan

Pada TW II-2026, agenda kepabeanan mencakup pengenaan BMAD/BMTP atas beberapa produk, antara lain BOPET, canai lantain dari besi/baja bukan paduan, tirai, benang serat stapel sintetik dan artifisial, serta kertas karton dupleks. Laporan terkait antara lain disampaikan melalui Nota Dinas Nomor EKM.01.01/33/D.II.M.EKON.6/4/2026 untuk PMK 14/2026, Nota Dinas Nomor EKM.01.01/41/D.II.M.EKON.6/4/2026 terkait BMAD canai lantain, Nota Dinas Nomor EKM.01.01/53/D.II.M.EKON.6/5/2026 untuk BMTP tirai, Nota Dinas Nomor EKM.01.01/54/D.II.M.EKON.6/5/2026 untuk BMTP benang, serta Nota Dinas Nomor EKM.01.01/96/D.II.M.EKON.06/2026 terkait BMAD kertas

karton dupleks. Selain itu, terdapat harmonisasi perubahan PMK 52/PMK.04/2020 mengenai bentuk fisik, spesifikasi, dan desain pita cukai.

i. Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

Kebijakan ini hasil tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian pada tanggal 28 April 2026 terkait 8 (delapan) agenda Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE), di antaranya usulan stimulus pembebasan bea masuk impor LPG sebagai sebagai bahan baku industri petrokimia. Pemerintah memberikan insentif penurunan tarif bea masuk menjadi sebesar 0% terhadap impor LPG dalam bentuk propana dan butana sebagai bahan baku industri petrokimia selama 6 bulan pos tarif. Laporan disampaikan melalui ND nomor EKM.01.05/97/D.II.M.EKON.6/6/2026 23 Juni 2026.

2. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

a. PNBP pada Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, serta K/L lainnya

Pembahasan mencakup RPP jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Arsip Nasional Republik Indonesia. Laporan harmonisasi RPP PNBP Kementerian Hukum telah disampaikan melalui Nota Dinas Nomor EKM.01.02/62/D.II.M.EKON.6/05/2026 tanggal 19 Mei 2026. Agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat basis PNBP, memperjelas objek dan tarif layanan, serta menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan akses layanan publik.

b. PNBP sektor ESDM dan PNBP hak negara lainnya

RPP perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2025 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian ESDM dilaporkan melalui Nota Dinas Nomor EKM.01.02/61/D.II.M.EKON.6/05/2026 tanggal 19 Mei 2026. Pada 19 Mei 2026 juga terdapat pembahasan PMK tentang jenis tarif atas jenis PNBP hak negara lainnya. Agenda ini penting untuk memastikan tarif PNBP lebih adaptif terhadap perkembangan biaya layanan, dinamika sektoral, dan kebutuhan pengelolaan penerimaan negara.

c. Pengelolaan anggaran OJK dan tarif layanan BLU

Pada 16 April 2026 dilaksanakan rapat pleno pengharmonisasian RPMK tentang Tata Cara Pengelolaan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan, dan laporan hasil rapat disampaikan melalui Nota Dinas Nomor EKM.01.01/45/D.II.M.EKON.6/4/2026 tanggal 20 April 2026. Regulasi terkait telah terbit sebagai PMK Nomor 27 Tahun 2026. Selain itu, terdapat agenda tarif layanan BLU Balai Pengujian Perkeretaapian pada 29 April 2026 yang berkaitan dengan penguatan akuntabilitas layanan dan penerimaan BLU.

3. Peningkatan Tata Kelola Belanja Negara, Transfer ke Daerah, dan Pelaporan Keuangan

a. Pengelolaan DBH dan DAU, termasuk penyaluran nontunai melalui *Treasury Deposit Facility*

Pada 13 April 2026 terdapat rapat harmonisasi RPMK tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Kebijakan ini memperkuat tata kelola transfer ke daerah, pengelolaan kas, serta akuntabilitas penggunaan DBH dan DAU. Dalam periode Juni 2026, telah disampaikan PMK Nomor 30 Tahun 2026 tentang pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility melalui Nota Dinas Nomor EKM.01.01/85/D.II.M.EKON.6/06/2026, serta PMK Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan DBH dan DAU melalui Nota Dinas Nomor EKM.01.01/87/D.II.M.EKON.6/06/2026 dan Nota Dinas Nomor EKM.01.01/90/D.II.M.EKON.6/06/2026.

b. Penyediaan dana program pensiun eks PNS Dephub pada PT KAI

Pada 16 April 2026 dilakukan harmonisasi RPMK tentang perubahan atas PMK Nomor 170/PMK.02/2016 mengenai penyediaan dana program penyesuaian pensiun eks PNS Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero). Laporan terkait disampaikan melalui Nota Dinas Nomor EKM.01.01/58/D.II.M.EKON.6/05/2026 tanggal 11 Mei 2026. Agenda ini berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pemerintah, kepastian pembayaran hak pensiun, dan penguatan tata kelola belanja yang bersifat mandatory.

c. Standar Biaya Masukan, diskon listrik, dan tata kelola pelaksanaan APBN

Pada 17 Juni 2026 dilakukan harmonisasi RPMK tentang Standar Biaya Masukan (SBM) yang dilaporkan melalui Nota Dinas Nomor EKM.01.03/95/D.II.M.EKON.6/06/2026 tanggal 19 Juni 2026. Pada 24 Juni 2026 dilakukan harmonisasi RPMK tentang tata cara penyediaan, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana untuk diskon biaya listrik tahun 2025. Selain itu, pada 11 Juni 2026 terdapat harmonisasi RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Rangkaian agenda ini memperkuat disiplin pelaksanaan anggaran, standardisasi biaya, serta pertanggungjawaban belanja subsidi/kompensasi.

d. Pertanggungjawaban APBN TA 2025 dan agenda perencanaan pembangunan

Pada 15 Juni 2026 dilakukan rapat pleno pengharmonisasian RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2025. Laporan hasil harmonisasi disampaikan melalui Nota Dinas Nomor EKM.01/91/D.II.M.EKON.6/06/2026 tanggal 17 Juni 2026, dan konsep ND kepada Menko Perekonomian disampaikan melalui Nota Dinas Nomor EKM.02.03/98/D.II.M.EKON.06/2026 tanggal 24 Juni 2026. Di sisi perencanaan, terdapat harmonisasi RPermen PPN/Kepala Bappenas terkait RKP 2027 serta tata cara penyusunan, penelaahan, dan perubahan Renja K/L. Agenda ini memperkuat kesinambungan siklus APBN, dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

e. Perencanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan

Pada akhir Juni 2026 telah disampaikan PMK Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 62 Tahun 2023 mengenai Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melalui Nota Dinas Nomor EKM.01.03/99/D.II.M.EKON.06/2026 tanggal 28 Juni 2026. Kebijakan ini memperkuat

pengaturan perencanaan dan pelaksanaan APBN agar lebih efektif, responsif terhadap prioritas, serta akuntabel dalam pelaporan keuangan.

4. Pembiayaan dan Investasi Pemerintah

a. Investasi pemerintah dan penambahan investasi pada lembaga keuangan internasional

Pada 28 April 2026 dilakukan harmonisasi RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 63 Tahun 2019 mengenai Investasi Pemerintah. Agenda ini berkaitan dengan penguatan peran investasi pemerintah sebagai instrumen pembiayaan pembangunan sekaligus dukungan terhadap kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.

b. Dana Abadi Daerah

Pada 10 Juni 2026 dilakukan harmonisasi RPMK tentang perubahan atas PMK Nomor 64 Tahun 2024 mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah.

c. Dana kerja sama pembangunan internasional dan dana pembangunan inovatif

Pada 13 April 2026 dilakukan harmonisasi RPMK tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional. Pada 22 Mei 2026 dilakukan pengharmonisasian RPermen PPN/Kepala Bappenas tentang pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Pembangunan Inovatif. Kedua agenda tersebut bertujuan memperkuat alternatif pembiayaan pembangunan yang lebih terstruktur, transparan, dan mampu menghimpun sumber pendanaan di luar skema pembiayaan konvensional.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.2. Persentase Efektifitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Diagnosa Ekonomi Makro dan Ketahanan Fiskal			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Koordinasi dan penyusunan Diagnosa Ekonomi Makro terkait perdagangan internasional	Terlaksana	Telah dilaksanakan: analisis ekspor 1.819 produk AS, analisis pelemahan rupiah, bahan referensi OECD MCM
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan Ketahanan Fiskal terkait pembiayaan	Terlaksana	Telah disusun dan disampaikan kepada Menko Perekonomian serta disebarluaskan kepada stakeholders terkait

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *capacity building* dan *focus group discussion* (FGD) dalam rangka pembinaan peningkatan kemampuan analisa perkembangan ekonomi makro dan kebijakan fiskal, terutama yang berhubungan dengan dinamika ekonomi terkini.
2. Penyampaian rekomendasi kebijakan perkembangan ekonomi terkini dan rekomendasi kebijakan ketahanan fiskal kepada Menko Perekonomian.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya rapat dilaksanakan menggunakan *zoom meeting* dengan mengundang narasumber yang ahli dibidangnya sehingga menambah ilmu dan wawasan bagi para pegawai di lingkup Asdep Ekonomi Makro dan Fiskal. Selain itu, penyimpanan dan dokumen serta keperluan administrasi persuratan menggunakan e-dokumen sehingga seluruh staf di asdep EMF dapat bekerja secara *real time*, efektif dan efisien.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Keterbatasan informasi dan koordinasi terkait implementasi pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal secara langsung, karena tugas dan fungsi dikoordinasikan oleh unit lain.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam mengolah data-data ekonomi terkini untuk disajikan sebagai bahan analisis kebijakan ekonomi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melaksanakan program/kegiatan sesuai rencana aksi pada triwulan III 2026.
2. Menghasilkan dan menerbitkan dokumen rekomendasi analisis kebijakan terkait diagnosis ekonomi makro dan ketahanan fiskal secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan.

2

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif internal *business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder yang ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu: Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1. Indeks Kepuasan Latar Belakang

Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal

Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal yang mencakup: a) penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; b) perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; c) pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; d) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi makro, ekonomi daerah dan fiskal; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh deputi.

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal mengukur indikator tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan meliputi: ketanggapan dalam pelayanan (responsiveness), kehandalan dalam pelayanan (reliability), sarana dan prasarana fisik (tangible), kepastian dalam pelayanan (assurance), dan sikap dalam pelayanan (empati); dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan meliputi: koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian pelaksanaan kebijakan, pengelolaan dan penanganan isu, penyelesaian isu di bidang perekonomian, dan pengawalan program prioritas nasional. Survey akan dilakukan dengan menggunakan Google Form. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi

$$\text{Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\sum \text{Jumlah dari masing – masing item survey}}{\text{Jumlah Item Survey}}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4. Penetapan target 3 atau “puas” tahun 2026 ditetapkan untuk memastikan bahwa penerima layanan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian di bidang ekonomi makro dan fiskal dapat mendapatkan pelayanan yang terbaik sesuai harapan. Adapun target triwulan sebesar 3 dari 4, atau setidaknya dapat mempertahankan capaian triwulan-triwulan sebelumnya.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, indeks kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian di bidang ekonomi makro dan fiskal mencapai telah terealisasi sebesar 3 dari 4 atau mencapai 100% dari target Tahun 2026 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal	Indeks	Puas (3 dari 4)	Puas (3 dari 4)	100%

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal merupakan *cascading direct* dari Indikator Indeks Kualitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi dengan target tahun 2026 sebesar Puas (3 dari 4). Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal ini diharapkan mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas terkait puas terhadap layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian yang dilakukan.

Realisasi capaian Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal yang tercapai pada triwulan II didorong oleh koordinasi yang efektif antar pegawai di Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal dengan stakeholder terkait. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian bidang ekonomi makro dan fiskal masih terus dilaksanakan, maka diprediksikan indeks kualitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang ekonomi makro dan fiskal akan terus stabil sehingga target tahun 2026 dapat terpenuhi. Dengan mempertahankan koordinasi yang baik tersebut, diperkirakan target tahunan akan tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian	Terlaksana	Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian terlaksana

2.	Penguatan kapasitas SDM dalam berkoordinasi lintas K/L melalui penyamaan pemahaman substansi ekonomi makro dan fiskal	Terlaksana	Penguatan kapasitas SDM dalam berkoordinasi lintas K/L melalui penyamaan pemahaman substansi ekonomi makro dan fiskal.
----	---	------------	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan *Google Form* sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp345.000,00. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya di triwulan III tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain:

(1) keterbatasan waktu dalam penyusunan kegiatan, (2) hasil survei yang belum dapat segera ditindaklanjuti, dan (3) tingginya tingkat kesibukan responden sehingga memengaruhi ketepatan waktu pengisian survei.

Sebagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut dan mendukung pencapaian target kinerja pada periode berikutnya, akan dilakukan beberapa langkah perbaikan, yaitu menyusun perencanaan kegiatan yang lebih matang melalui penyusunan timeline secara rinci, membangun mekanisme tindak lanjut hasil survei yang lebih terstruktur, serta memberikan fleksibilitas waktu pengisian survei dalam rentang periode tertentu agar tingkat partisipasi responden dapat meningkat.

3

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal yang Profesional

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan Bidang Perekonomian yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif internal *business process* yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder yang ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja yaitu: Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Latar Belakang

Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal

Terwujudnya tata kelola Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal yang profesional merupakan sasaran strategis yang berfokus pada Perspektif Learning and Growth dan merupakan turunan dari sasaran strategis Perspektif *Learning and Growth* level ke deputian yakni Terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang Profesional. Ketercapaian sasaran strategis ini akan mendukung terwujudnya pelaksanaan proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang efektif di lingkungan Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal yang profesional.

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal

Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal sebagai berikut:

Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Optimalisasi Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal Tahun 2026	• Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Penyusunan Renja 2026 • Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Penyusunan Revisi Renja 2026 • Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	• Penyusunan dan Penetapan Tim Kerja • Penyusunan Matriks Manajemen Risiko • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2026 • Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	• Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Penyusunan Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2027 • Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI • Pengisian <u>Survey</u> Penilaian Integritas (SPI)

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan/atau RB Tematik di Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92% penetapan target tahun 2026 didasarkan pada rencana aksi Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal tahun

2026 yang berpedoman pada manual IKU. Untuk target capaian pelaksanaan renaksi RB tahun 2025 didasarkan pada dokumen manual IKU yang telah disepakati bersama yaitu sebesar 85%.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 100% atau mencapai 40% dari target Tahun 2026 sebesar 92% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026	Realisasi TW II 2026	% Kinerja
IKU-3.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal	Persentase	92%	40%	100%

Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal merupakan *cascading direct* dari indikator persentase pemenuhan dokumen yang menjadi bukti pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 92%. Sampai dengan laporan ini disusun, persentase pemenuhan dokumen yang menjadi bukti pelaksanaan RB Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal sudah berjalan sesuai dengan rencana aksi yang disusun pada awal tahun dan telah disepakati bersama. Terdapat tiga inisiatif strategis yang mendasari pemenuhan dokumen pelaksanaan RB Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal, antara lain:

- Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan
- Penyusunan Revisi Renja 2026
- Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi

Ketiga inisiatif strategis didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi RB General dan/atau RB Tematik di lingkungan Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal. Selain itu, inisiatif strategis ini dipetakan berdasarkan jumlah minimum IKU RB yang wajib didukung pada level keasdepan. Pada triwulan II tahun 2026, fokus pelaksanaan RB dilakukan pada inisiatif (1) terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan; (2) terlaksananya penyusunan Renja 2026; dan (3) terlaksananya Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI.

Dalam rangka mendukung implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal, berbagai inisiatif strategis telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola organisasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta optimalisasi pelayanan administrasi.

Selanjutnya, penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan laporan diawali dengan pengumpulan data realisasi kinerja dari masing-masing penanggung jawab kegiatan, dilanjutkan dengan proses verifikasi, analisis capaian indikator kinerja, identifikasi faktor pendukung dan kendala, serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Laporan tersebut menjadi instrumen evaluasi yang mendukung pengambilan keputusan serta memastikan pelaksanaan program tetap sejalan dengan target yang telah ditetapkan.

Pada aspek perencanaan, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dilakukan melalui identifikasi kebutuhan program dan kegiatan, penelaahan prioritas pembangunan nasional, serta penyelarasan dengan arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Proses penyusunan juga melibatkan koordinasi dengan unit-unit terkait untuk memastikan keselarasan antara sasaran strategis, indikator kinerja, target capaian, dan kebutuhan anggaran, sehingga dokumen Renja yang dihasilkan dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Selain itu, optimalisasi pemanfaatan aplikasi SRIKANDI terus didorong sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemanfaatan aplikasi dilakukan dalam pengelolaan naskah dinas secara elektronik, mulai dari proses surat masuk, surat keluar, disposisi, persetujuan dokumen, hingga pengarsipan. Penerapan SRIKANDI diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses administrasi, mempercepat alur koordinasi, memperkuat akuntabilitas pengelolaan dokumen, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.

Sampai dengan akhir triwulan II Indikator Kinerja Utama Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Diperkirakan dengan melihat jangka waktu dan hasil yang telah dicapai pada triwulan II, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Asisten Deputy Ekonomi Makro dan Fiskal diproyeksikan dapat tercapai di akhir triwulan IV 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026 sebagai berikut

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Ekonomi Makro dan Fiskal			
No	Rencana Aksi Triwulan II	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan Laporan	Terlaksana	Dilaksanakan pada Triwulan II-2026 melalui pengumpulan data capaian kinerja, verifikasi, analisis indikator

	Kinerja Triwulanan		kinerja, penyusunan narasi evaluasi, serta finalisasi laporan. Kegiatan dilaksanakan di lingkungan Asdep Ekonomi Makro dan Fiskal berkoordinasi bersama unit terkait.
2.	Penyusunan Renja 2026	Terlaksana	Dilaksanakan melalui identifikasi kebutuhan program dan kegiatan, penyusunan usulan target dan indikator kinerja, serta pembahasan dan sinkronisasi dengan unit terkait. Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan II - 2026 di lingkungan Asdep Ekonomi Makro dan Fiskal.
3.	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan surat masuk dan keluar, persetujuan dokumen, disposisi dan pengarsipan naskah dinas elektronik di lingkungan Asdep Ekonomi Makro dan Fiskal.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya adalah:

1. Sebagian pelaksanaan koordinasi dilaksanakan secara *hybrid* menggunakan media komunikasi telekonferens (*online*) sehingga perjalanan dinas luar kota dilaksanakan selektif sesuai dengan urgensi.
2. Pemberkasan administrasi persuratan sudah menggunakan aplikasi Srikandi dan media penyimpanan cloud sehingga sudah tidak memerlukan banyak peralatan ATK seperti kertas ataupun lemari untuk administrasi surat-surat.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu: (1) Penyesuaian terhadap kebijakan dan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi memerlukan proses koordinasi dan penyelarasan dalam penyusunan dokumen. (2) Keterbatasan waktu pelaksanaan akibat tingginya beban kerja dan pelaksanaan tugas lain yang bersifat prioritas. (3) Proses penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan masih memerlukan koordinasi serta sinkronisasi dengan unit kerja terkait, sehingga berpotensi memengaruhi ketepatan waktu penyelesaian. (4) Pemanfaatan aplikasi SRIKANDI belum sepenuhnya optimal sehingga masih diperlukan peningkatan konsistensi dalam penerapan administrasi naskah dinas secara elektronik.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu: (1) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan unit terkait untuk mempercepat proses penyusunan, review, dan

penyelesaian dokumen. (2) Menyusun jadwal dan timeline pelaksanaan kegiatan secara lebih terstruktur agar setiap tahapan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target. (3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi guna memastikan capaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. (4) Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SRIKANDI melalui peningkatan kepatuhan penggunaan naskah dinas elektronik serta pendampingan bagi pengguna apabila diperlukan.

Jakarta, 6 Juli 2026

Plt. Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal



Siti Wahyuningrum
NIP 197903252000122001